

**ANALISIS PERAN *STAKEHOLDERS* SKEMA *PENTA HELIX* DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM LITERASI ZAKAT DI BAZNAS KOTA
BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**INDRA PERMANA
NPM 2016041007**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**ANALISIS PERAN *STAKEHOLDERS* SKEMA *PENTA HELIX* DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM LITERASI ZAKAT DI BAZNAS KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**INDRA PERMANA
NPM 2016041007**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK:

ANALISIS PERAN *STAKEHOLDERS* SKEMA *PENTA HELIX* DALAM PELAKSANAAN PROGRAM LITERASI ZAKAT DI BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

Indra Permana

Rendahnya pengumpulan zakat melalui BAZNAS Kota Bandar Lampung disebabkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Akibatnya, masyarakat lebih memilih menyalurkannya secara langsung kepada mustahik. Program literasi zakat dilakukan BAZNAS Kota Bandar Lampung untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui peran *stakeholders* skema *penta helix* merupakan referensi dalam mengembangkan kerja sama antara instansi terkait didalam mendukung seoptimal mungkin mencapai tujuan optimalisasi pengumpulan dan peningkatan kesadaran berzakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran *stakeholders* skema *penta helix* beserta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program literasi zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peran *stakeholders* skema *penta helix* sudah berjalan baik meskipun masih membutuhkan peningkatan agar lebih optimal, jika dilihat melalui indikator *penta helix* Slamet dkk (2016). Pada unsur pemerintah telah melakukan perannya sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator dengan turut bekerja sama ke berbagai aktor kepentingan; pada unsur bisnis sebagai *enabler* dan *supporter*; pada unsur akademisi sebagai mitra Tridharma perguruan tinggi dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ); pada unsur masyarakat sebagai mitra UPZ dan akselelator; dan pada unsur media sebagai *expander*/publikator. Faktor pendukung datang dari dasar hukum yang kuat dan kesadaran bersama. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu komunikasi tidak optimal dan keterbatasan tenaga kerja mumpuni dalam pengelolaan kemediain di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: Peran *Stakeholders*, *Penta Helix*, Literasi Zakat

ABSTRACT:

ANALYSIS OF THE ROLE OF PENTA HELIX SCHEME STAKEHOLDERS IN IMPLEMENTING THE ZAKAT LITERACY PROGRAM IN BAZNAS BANDAR LAMPUNG CITY

By:

Indra Permana

The low level of zakat collection through BAZNAS Bandar Lampung City is due to the lack of public knowledge of the Zakat Management Organization (OPZ). As a result, people prefer to distribute it directly to mustahik. The zakat literacy program was carried out by BAZNAS Bandar Lampung City to overcome this problem. Through the role of stakeholders, the penta helix scheme is a reference in developing cooperation between related agencies in supporting as optimally as possible the goal of optimizing collection and increasing awareness of zakat at BAZNAS Bandar Lampung City. The aim of this research is to analyze and describe the role of stakeholders in the penta helix scheme along with supporting and inhibiting factors in implementing the zakat literacy program at BAZNAS Bandar Lampung City. This research uses descriptive qualitative methods with interview, observation and documentation data collection techniques. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the research results, it shows that the role of stakeholders in the penta helix scheme has been running well, although it still needs improvement to make it more optimal, if seen through the penta helix indicators of Slamet et al (2016). The government has carried out its role as regulator, facilitator and coordinator by collaborating with various interested actors; on business elements as enablers and supporters; in the academic element as a Tridharma partner of higher education and the Zakat Collection Unit (UPZ); on community elements as UPZ partners and accelerators; and on media elements as expanders/publicators. Supporting factors come from a strong legal basis and shared awareness. Meanwhile, the inhibiting factors are not optimal communication and limited qualified workforce in media management at BAZNAS Bandar Lampung City.

Keywords: *Role of Stakeholders, Penta Helix, Zakat Literacy*

Judul Skripsi : **Analisis Peran Stakeholders Skema Penta Helix dalam Pelaksanaan Program Literasi Zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung**

Nama Mahasiswa : **Indra Permana**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2016041007**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

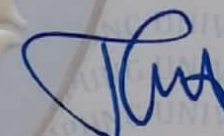
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

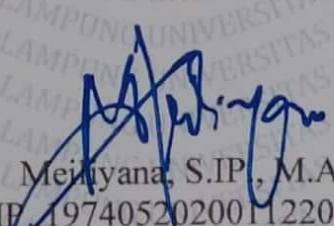

Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.

NIP. 198308152010122002


Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si.

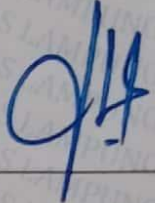
NIP. 199109242019032019

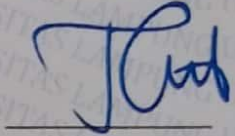
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meilnyana, S.IP., M.A.
NIP. 197405202001122002

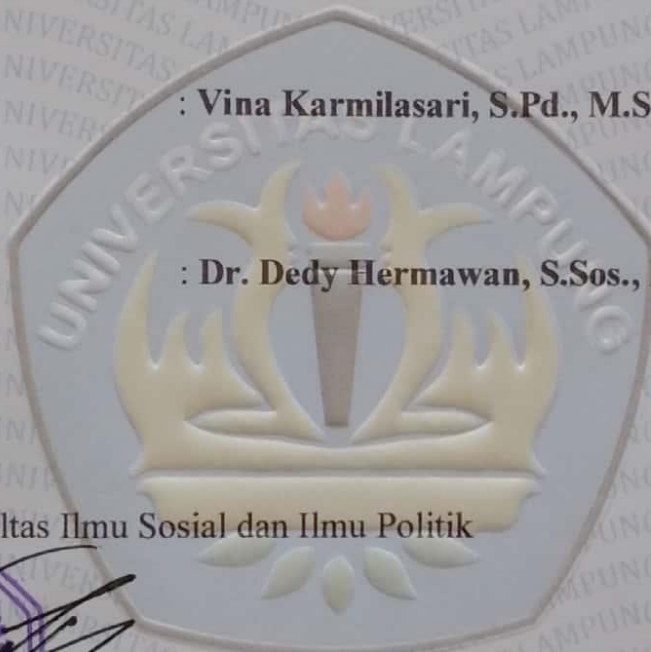
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.** 

Sekretaris : **Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si.** 

Penguji : **Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.** 



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **12 Juli 2024**

PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 12 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Indra Permana

NPM 2016041007

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Karawang pada tanggal 4 Mei 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan putra dari pasangan Bapak Agus Supriyadi dan Ibu Indriyati. Jenjang pendidikan penulis yaitu Sekolah Dasar di SDN 1 Purwosari yang diselesaikan pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Kota Gajah yang diselesaikan pada tahun 2017, dan mengenyam pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kota Gajah dan diselesaikan pada tahun 2020. Pendidikan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SNMPTN pada tahun 2020, dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung.

Selama menjalani dunia perkuliahan, penulis aktif mengikuti beberapa organisasi yaitu Himpunan Jurusan Ilmu Administrasi Negara (Himagara), Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) FISIP UNILA sebagai Ketua Bidang *Media Center* dan *Branding* periode 2022. Selain itu, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Januari-Februari 2023 di Pekon Sedampah Indah, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Pada Februari-Agustus 2023 peneliti juga melaksanakan kegiatan magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

MOTTO

”Jika tidak bisa melakukannya dengan baik, maka lakukanlah dengan rasa suka dan cinta disetiap prosesnya”

(Indra Permana)

PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim
Dengan menyebut nama Allah,
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang*

Ku persembahkan karyaku ini sebagai tanda cinta dan kasih sayangku kepada:

Kedua Orang Tua Ku Tercinta

Ayah Agus Supriyadi dan Ibu Indriyati yang telah membesarkanku, merawat serta mendidik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Terima kasih atas segala doa, dukungan, semangat, kerja keras tanpa lelah dan segala hal yang telah dilakukan demi kebahagiaan dan kesuksesanku.

Kepada Adikku Tersayang

Ahmad Naufal Fauzaan mari bersama-sama kita berjuang untuk membuat Ayah dan Ibu bangga.

Para Dosen

Terima kasih telah membimbing dengan setulus hati dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, dan segala pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan

Sahabatku

Semua sahabatku yang selalu ada baik suka maupun duka, memberi banyak bantuan, memberikan saran serta saling memberikan semangat.

Serta
**Almamater Tercinta
Universitas Lampung Tercinta**

SANWACANA

Alhamdulillahirabbiral'amin, Puji syukur dihadapan ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Peran Stakeholders Skema Penta Helix dalam Pelaksanaan Program Literasi Zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi negara di Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas segala ilmu, dukungan, semangat, dan apresiasi yang diberikan kepada penulis.
4. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan sumbangan pikiran, motivasi, kritik, dan saran yang membangun dalam menyusun skripsi sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik.
5. Ibu Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan sumbangan

pikiran, motivasi, kritik, dan saran yang membangun dalam menyusun skripsi sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik.

6. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan sumbangan pikiran, kritik, dan saran yang membangun dalam memperbaiki penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman belajar yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Seluruh staf dan jajarannya Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada orang yang paling aku cintai Ayah dan Ibuku yaitu Agus Supriyadi dan Indriyati yang sudah memberikan kasih sayang serta memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada Bapak Dr. Abdul Aziz, M.Pd.I selaku Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Bandar Lampung. Sekaligus informan dalam penelitian ini yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan tentang BAZNAS Kota Bandar Lampung
11. Kepada Bapak Doni Peryanto, S.P.I. selaku *staff* pelaksana bidang pengumpulan dan Kepala Kesekretariatan BAZNAS Kota Bandar Lampung, sekaligus informan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan banyak ilmu pengetahuan tentang zakat khususnya di BAZNAS Kota Bandar Lampung.
12. Kepada seluruh keluarga besar BAZNAS Kota Bandar Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan dan juga bantuan dalam penulisan skripsi.
13. Kepada seluruh informan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi.
14. Kepada saudari Uly Aulia Putri, terima kasih atas dukungan semangat dalam pengerjaan skripsi ini dan menjadi tempat berbagi cerita. Semoga kesuksesan dan apa yang menjadi harapanmu cepat terkabul.
15. Kepada teman-teman magang MBKM BAZNAS Kota Bandar Lampung tahun 2023 yang telah memberikan cerita baru dalam setiap kegiatan magang.

16. Kepada teman-teman satu bimbingan Hendra, Alya, Intan, dan Vika, terima kasih atas dukungan, dan semangat yang diberikan sebagai kawan seperjuangan selama pengerjaan skripsi. Doa terbaik menyertai kalian semoga kita dapat mencapai puncak karir kesuksesan kita masing-masing.
17. Kepada teman sekaligus sahabat jurusan, Ilham, Putu, dan Irfan terima kasih atas dukungan, saran, dan semangat yang diberikan sebagai kawan seperjuangan selama di perkuliahan. Doa terbaik menyertai kalian semua dan semoga kita dapat mencapai puncak karir kesuksesan kita masing-masing.
18. Kepada teman-teman FSPI FISIP UNILA Kabinet Adhara. Terima kasih atas semua canda, kebaikan, dan kehangatan yang telah diberikan
19. Untuk teman-teman kelas Reguler A, terima kasih dukungan yang diberikan dari awal mahasiswa baru sampai pada tahap ini.
20. Kepada seluruh teman angkatan ADAMANTIA, terima kasih untuk setiap kebersamaan selama perkuliahan. Doa terbaik untuk kita semua semoga kita selalu diberi kesehatan dan kesuksesan di masa yang akan datang.
21. Kepada mba abang HIMAGARA, terima kasih sudah menjadi tempat untuk meminta saran serta bantuannya selama perkuliahan dan selama menempuh di kegiatan organisasi.
22. Kepada teman-teman kos griya nimas, Satria, Heri, Aziz, Aril, dan Mas Catur yang telah memberikan canda tawa dan kehangatan di setiap harinya. Doa baik untuk kalian semoga kelak dapat bersua kembali dengan cerita kesuksesan masing-masing.
23. Terakhir, terima kasih untuk diriku karena telah berusaha dan bekerja keras sampai pada penyusunan skripsi ini.

Semoga dengan kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan pada penulis mendapat balasan pahala dari ALLAH SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kemajuan pendidikan.

Bandar Lampung, 12 Juli 2024

Penulis,

Indra Permana

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kebijakan Publik.....	12
2.3 Implementasi Kebijakan	13
2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan.....	13
2.3.2 Model-Model Implementasi Kebijakan	14
2.3.3 Aktor Implementasi Kebijakan Perspektif Governance	17
2.4 Konsep Aktor <i>Penta helix</i>	19
2.5 Konsep Pengelolaan dan Literasi Zakat.....	22
2.6 Kerangka Berpikir.....	23
III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	26
3.2 Fokus Penelitian.....	27
3.3 Lokasi Penelitian.....	28
3.4. Jenis Data.....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6 Teknik Analisis Data	33
3.7 Uji Kredibilitas.....	34
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1 Gambaran Umum BAZNAS Kota Bandar Lampung	36
4.1.2 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung	37

4.1.3 Visi dan Misi BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	40
4.1.4 Program Literasi Zakat.....	41
4.2 Hasil Penelitian	43
4.2.1 Peran <i>Stakeholders</i> Skema <i>Penta Helix</i> Dalam Pelaksanaan Program Literasi Zakat Di BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	44
4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Peran <i>Stakeholders</i> Skema <i>Penta Helix</i> Dalam Pelaksanaan Program Literasi Zakat Di BAZNAS Kota Bandar Lampung	87
4.3 Pembahasan Penelitian.....	90
4.3.1 Peran <i>Stakeholders</i> Skema <i>Penta Helix</i> Dalam Pelaksanaan Program Literasi Zakat Di BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	90
4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Peran <i>Stakeholders</i> Skema <i>Penta Helix</i> Dalam Pelaksanaan Program Literasi Zakat Di BAZNAS Kota Bandar Lampung	122
V. SIMPULAN DAN SARAN	130
5.1 Simpulan	130
5.2 Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Pencapaian Zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung	2
2. Dimensi dan Variabel Indeks Literasi Zakat (ILZ)	4
3. Penelitian Terdahulu	9
4. Informan Penelitian.....	30
5. Dokumen Pendukung Penelitian.....	32
6. Matriks peran fasilitator BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan program literasi zakat	93
7. <i>Stakeholders</i> Skema <i>Penta Helix</i> yang Bekerja Sama dalam Pelaksanaan Program Literasi Zakat	96
8. <i>Stakeholders</i> Masyarakat dan Perannya dalam Melakukan Edukasi	112
9. Matriks Peran <i>Stakeholders</i> Skema <i>Penta Helix</i> dalam Pelaksanaan Program Literasi Zakat	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	25
2. Komponen Dalam Analisis Data (Model Interaktif)	33
3. Logo BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	36
4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung	37
5. Komponen Indikator ILZ	42
6. Surat Edaran Gerakan Sadar Zakat dari Pemerintah Kota	48
7. Pembinaan dan Edukasi UPZ masjid	51
8. Perjanjian Kerja Sama Keripik Askha Jaya bersama BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	53
9. Sertifikat Taat Zakat.....	54
10. Publikasi Peran Kerja Sama Keripik Askha Jaya dengan BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	55
11. Publikasi Apresiasi Taat Zakat Beeme	56
12. Perjanjian Kerja Sama FH UNILA bersama BAZNAS Kota Bandar Lampung....	59
13. Perjanjian Kerja Sama MD UIN RIL bersama BAZNAS Kota Bandar Lampung	60
14. Audiensi BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan FH UNILA.....	64
15. Surat Tugas Duta Zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung	66
16. SK UPZ YAPEPAM.....	68
17. SK UPZ Masjid Khairul Falah.....	69
18. <i>Booth</i> Gerai Zakat Duta Zakat	71
19. Plang UPZ YAPEPAM	72
20. Banner UPZ Yayasan Asmai Rahman.....	73
21. Poster dan Qris ZIS di Papan Informasi Masjid Nurul Aman.....	76
22. Akun <i>Instagram</i> BAZNAS Kota Bandar Lampung	83
23. Publikasi Lampost.....	85
24. Publikasi Tribun Lampung.....	86
25. Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Literasi Zakat	100
26. Peran Bisnis dalam Pelaksanaan Program Literasi Zakat	105
27. Peran akademisi dalam Pelaksanaan Program Literasi Zakat.....	110
28. Peran masyarakat dalam Pelaksanaan Program Literasi Zakat.....	118
29. Peran Media dalam Pelaksanaan Program Literasi Zakat.....	121

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Populasi penduduk islam Indonesia pada tahun 2022 mencapai 237,56 juta jiwa (Kemenag, 2022). Provinsi Lampung mempunyai jumlah penduduk islam sebanyak 8.85 juta jiwa dan Kota Bandar Lampung memiliki jumlah penduduk islam sebanyak 1.14 juta jiwa atau 93,6 % dari total jumlah penduduk Kota Bandar Lampung sebanyak 1.21 juta jiwa (Disdukcapil, 2023). Melihat data tersebut menunjukkan potensi pengumpulan dana zakat di Indonesia khususnya di Kota Bandar Lampung yang luar biasa, dan pantas untuk dikembangkan guna mendorong perekonomian daerah, upaya pemberdayaan ekonomi melalui potensi zakat yang baik akan memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan menggerakkan roda perekonomian (Novelistia, 2023).

Potensi zakat Indonesia sangat besar, berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) tahun 2019 tercatat potensi zakat di Indonesia senilai Rp 233,8 triliun. Kemudian di tahun 2020 potensi zakat Indonesia senilai Rp 327,6 triliun (Puskas BAZNAS, 2019). Potensi zakat yang besar juga dimiliki oleh Kota Bandar Lampung, berdasarkan IPPZ tahun 2022 yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS RI. Kota Bandar Lampung memiliki total potensi zakat sebesar Rp 663,19 miliar (BAZNAS Kota Bandar Lampung, 2022).

Tabel 1. Jumlah Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung

No	Tahun	Realisasi Pengumpulan
1	2020	Rp 2.645.700.365
2	2021	Rp 3.451.237.933
3	2022	Rp 3.148.678.497

Sumber: diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 1 menerangkan bahwasanya realisasi pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung masih mengalami pasang surut, dalam arti belum mampu mengoptimalkan potensi zakat secara maksimal. Gap atau ketimpangan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat di Kota Bandar Lampung masih terlihat dengan realisasi yang masih jauh dari potensi. Realisasi zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung di tahun 2020 sebesar Rp 2.645.700.365, di tahun 2021 terealisasi Rp 3.451.237.933, dan di tahun 2022 hanya terealisasi Rp 2.795.512.497. Realisasi tersebut sudah merupakan rekapitulasi dari penghimpunan Zakat, Infak Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) meliputi penerimaan zakat mal, zakat profesi, zakat fitrah, infak/sedekah, dan penerimaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Berdasarkan hasil wawancara pra riset dengan Bapak Abdul Aziz selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Bandar. Kenyataannya potensi zakat Kota Bandar Lampung belum dapat di katakan optimal. Penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat untuk menunaikan zakat melalui badan amil resmi. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pra riset dengan tim pengurus BAZNAS Kota Bandar Lampung pada saat pelaksanaan Magang Bersertifikat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama 6 bulan. Didapati bahwa masyarakat Kota Bandar Lampung banyak yang telah mencapai batasan minimal mengeluarkan harta wajib dikenakan zakat (nisab), namun masih banyak masyarakat yang menyalurkan secara langsung kepada orang di sekitar rumahnya. Selain itu, dijumpai juga masyarakat yang belum mengenal BAZNAS. Hasil riset dari Ascarya & Yumanita (2018) rendahnya pengumpulan zakat di Indonesia disebabkan oleh kurang dikenalnya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di masyarakat. Akibatnya, zakat yang

dikumpulkan dan disalurkan sendiri oleh masyarakat dinilai kurang tepat dalam upaya menyejahterakan masyarakat karena tidak memiliki dampak jangka panjang. Masyarakat dianjurkan dalam menunaikan zakatnya dilakukan ke badan resmi agar dana zakat tersebut dapat dikumpulkan, didistribusikan, dan didayagunakan dengan jelas kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, serta jelas pula dampak yang diterima oleh masyarakat secara luas.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS adalah lembaga non struktural yang dibentuk oleh pemerintah dengan tanggung jawab menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS mengacu pada pasal 4 ayat (1) Peraturan pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS diinstruksikan untuk menyusun Pedoman Pengelolaan Zakat. Dalam hal ini BAZNAS menyusun Rencana Strategis sebagai acuan pengelolaan zakat baik untuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Dalam kerangka ini, terdapat empat pilar atau strategi yang disusun untuk menguatkan dan mengembangkan zakat yaitu (1) pilar SDM Amil, (2) pilar pengumpulan, (3) pilar penyaluran, (4) pilar pengendalian (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2014).

Sejak tahun 2020 Program Literasi Zakat menjadi salah satu program utama pilar pengumpulan yang tertuang dalam Rencana Strategis BAZNAS RI 2020-2025. Meningkatkan literasi zakat nasional dan meningkatkan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur menjadi salah satu indikator utama dalam pilar pengumpulan BAZNAS RI (BAZNAS RI, 2020). Hal serupa yang dilaksanakan BAZNAS Kota Bandar Lampung sebagai lembaga yang membantu pengelolaan zakat di daerah turut memasukan program literasi zakat ke dalam Rencana Strategis BAZNAS Kota Bandar Lampung 2022-2027 sebagai strategi dasar pilar pengumpulan dengan tujuan optimalisasi potensi zakat Kota Bandar Lampung dengan peningkatan realisasi pertumbuhan dan

pengumpulan zakat, serta peningkatan kesadaran membayar zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung (BAZNAS Kota Bandar Lampung, 2022).

Program literasi zakat ini tercipta setelah Pusat Kajian Strategis BAZNAS tahun 2019 mengeluarkan Indeks Literasi Zakat (ILZ) dengan tujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat tentang zakat dan untuk menyebarkan program edukasi zakat yang dilakukan oleh OPZ (Puskas BAZNAS, 2019).

Tabel 2. Dimensi dan variabel Indeks Literasi Zakat (ILZ)

Dimensi	Variabel
1. Pengetahuan Dasar	1. Pengetahuan zakat secara umum 2. Pengetahuan kewajiban membayar zakat 3. Pengetahuan 8 asnaf 4. Pengetahuan penghitungan zakat 5. Pengetahuan objek zakat
2. Pengetahuan Lanjutan	1. Pengetahuan instansi zakat 2. Pengetahuan regulasi zakat 3. Pengetahuan dampak zakat 4. Pengetahuan program-program penyaluran zakat 5. <i>Digital payment</i>

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 2 unsur penyusunan ILZ terdiri atas 2 (dua) dimensi yaitu pengetahuan dasar tentang zakat dan pengetahuan lanjutan tentang zakat. Dimensi pengetahuan dasar tentang zakat terdiri dari 5 variabel yaitu pengetahuan zakat secara umum, pengetahuan kewajiban membayar zakat, pengetahuan 8 asnaf, pengetahuan penghitungan zakat dan pengetahuan objek zakat. Dimensi pengetahuan lanjutan tentang zakat terdiri dari 5 variabel yaitu pengetahuan instansi zakat, pengetahuan regulasi zakat, pengetahuan dampak zakat, pengetahuan program-program penyaluran zakat dan pengetahuan pembayaran zakat secara digital (Puskas BAZNAS, 2019).

Menurut Ascarya & Yumanita (2018) Kurangnya literasi atau pengetahuan masyarakat tentang zakat, termasuk pengetahuan umum tentang zakat dan pentingnya membayar zakat melalui lembaga amil resmi, menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam membayar zakat melalui lembaga resmi. Kemudian hasil penelitiannya merekomendasikan BAZNAS agar melakukan edukasi dan sosialisasi zakat secara masif dan berkelanjutan. Hasil riset BAZNAS (2020) sosialisasi dan kampanye zakat memberikan hasil yang positif terhadap kesadaran masyarakat dan berdampak kepada meningkatnya pengumpulan zakat.

Upaya dan peran pelaksanaan program literasi zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung dilakukan melalui sosialisasi edukasi dengan membangun kerja sama atau kemitraan. BAZNAS Kota Bandar Lampung masih menjadi aktor yang paling besar dalam meningkatkan literasi zakat di Kota Bandar Lampung. Sementara tantangan dan permasalahan dalam melakukan sosialisasi kesadaran berzakat akan terus berkembang. Sehingga pengembangan program akan terhambat apabila hanya mengandalkan kekuatan dari BAZNAS Kota Bandar Lampung sebagai aktor utamanya. Karena tentu BAZNAS Kota Bandar Lampung memiliki keterbatasan mulai dari jumlah dan kualitas SDM Amil. Sebagaimana yang dikatakan Hudaifah dkk (2020) dalam mengatasi keterbatasan sumber daya dana operasional, tenaga dan teknologi, BAZNAS perlu membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran zakat. Salah satu pilihannya dengan melibatkan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau mitra pengumpul zakat. Melalui kerangka kerja sama ini, kekurangan sumber daya manusia untuk mensosialisasikan kesadaran zakat dapat diatasi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pada Pasal 7 ayat (2) BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, berdasarkan pasal Undang-Undang tersebut, salah satu langkah yang akan dilakukan BAZNAS Kota Bandar Lampung adalah menggandeng berbagai

stakeholders. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi langsung dalam program literasi zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat melalui BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Melalui peran *stakeholders* skema *penta helix* (pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat, dan media) dipandang mampu memperkuat program literasi zakat dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terkait menunaikan zakat sehingga tercapainya peningkatan pengumpulan zakat di Kota Bandar Lampung. Menurut Halibas dkk (2017) Konsep *penta helix* digunakan untuk pembangunan sosial ekonomi melalui kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat dan media sosial.

Berdasarkan hasil wawancara pra riset dengan staff pelaksana bidang pengumpulan BAZNAS Kota Bandar Lampung yaitu Bapak Doni Peryanto. Menurutnya dalam konsep *penta helix* BAZNAS Kota Bandar Lampung telah melakukan kerjasama dengan kelima unsur *stakeholders* yang berada di dalamnya yaitu: Dari unsur pemerintah Melalui BAZNAS Kota Bandar Lampung sebagai regulator program literasi zakat melakukan sosialisasi, edukasi, dan membangun kerjasama/kemitraan. Unsur bisnis melalui kesepakatan kerjasama dengan PT Serikat Raja Lokal (Beeme) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) kepada Keripik Askha Jaya. Unsur akademisi dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bersama Universitas Lampung dan UIN Raden Intan. Unsur masyarakat dengan membentuk kemitraan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis yayasan/masjid dan membentuk duta zakat. Unsur media seperti Lampung Post/media massa Lampung lainnya dengan melakukan publikasi kegiatan. Kerjasama tersebut dilakukan guna memasifkan edukasi dan sosialisasi literasi zakat, sehingga akan berpengaruh dengan peningkatan pemahaman kesadaran berzakat dan peningkatan pengumpulan yang mengacu pada Rencana Strategis BAZNAS Kota Bandar Lampung tahun 2022-2027.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, untuk melihat sejauh mana peran *stakeholders* skema *penta helix* pada program literasi zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Maka penulis ingin

mengkaji lebih jauh melalui riset penelitian dengan judul “**Analisis Peran Stakeholders Skema Penta Helix Dalam Meningkatkan Program Literasi Zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *stakeholders* skema *penta helix* dalam pelaksanaan program literasi zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholders* skema *penta helix* dalam pelaksanaan program literasi zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis peran *stakeholders* skema *penta helix* dalam pelaksanaan program literasi zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholders* skema *penta helix* dalam pelaksanaan program literasi zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan dan sumber referensi bacaan akan pentingnya memaksimalkan peran *stakeholders* skema *penta helix* dalam pelaksanaan suatu program. Kemudian dapat menjadi acuan pada penelitian lebih lanjut mengenai peran *stakeholders penta helix* dalam pelaksanaan program literasi di BAZNAS Kota Bandar Lampung

2. Manfaat Praktis

Sebagai referensi bagi pihak-pihak terkait terutama BAZNAS Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini agar dapat lebih mengoptimalkan keterlibatan peran *stakeholders* skema *penta helix* untuk mendukung segala aktivitas program literasi zakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis memanfaatkan penelitian terdahulu sebagai referensi untuk memperkaya teori dan memahami urgensi penelitian ini. Selain itu, penelitian sebelumnya juga digunakan sebagai acuan untuk memperdalam bahan kajian. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
(Ascarya & Diana Yumanita, 2018)	Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya	Didapati bahwa rendahnya tingkat literasi pengetahuan masyarakat tentang zakat menjadi faktor penentu seseorang membayar zakat melalui lembaga resmi.	Persamaan Penelitian Terletak pada hasil bahasan mengenai pentingnya literasi zakat dan kerjasama. Perbedaan Penelitian Terletak pada objek yang diteliti yaitu analisis rendahnya penghimpunan zakat dan alternatif solusinya.

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
(Pertiwi, 2020)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Provinsi Lampung	Ditemukan bahwa pendapatan, literasi zakat, dan kepercayaan secara bersama-sama mempengaruhi minat membayar zakat, dengan variabel kepercayaan mempunyai pengaruh yang paling besar dibandingkan variabel lainnya.	<p>Persamaan Penelitian Terletak pada objek penelitian terkait literasi zakat dan kepercayaan membayar zakat melalui BAZNAS.</p> <p>Perbedaan Penelitian Terletak pada metode penelitian dan lokus yang diteliti.</p>
(Winarno dkk., 2021)	Pengembangan Desa Wisata Adat Using Kemiren Melalui Pendekatan <i>Penta Helix</i>	Ditemukan bahwa dalam pengembangan desa wisata masih terdapat ketergantungan pada dua aktor utama yaitu pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian ini ingin melihat bagaimana konsep <i>penta helix</i> dapat mendukung pengembangan Desa Wisata Kemiren. Meski dalam praktiknya, kelima pelaku <i>penta helix</i> tersebut belum memainkan perannya secara maksimal.	<p>Persamaan Penelitian Terletak pada fokus penelitian terkait model <i>penta helix</i> yang sama-sama ingin melihat peran dari kelima aktor tersebut dalam mempengaruhi suatu objek.</p> <p>Perbedaan Penelitian Terletak pada lokus dan objek yang diteliti yaitu terkait pengembangan Desa Wisata Adat Using Kemiren.</p>
(Rohmania dan Sri Astuti, 2022)	Analisis Peran Aktor <i>Penta Helix</i> Dalam Pengembangan Wisata Taman Anggrek Sememi Ex Lokalisasi Moroseneng Kota Surabaya	Didapati bahwa peran aktor <i>Penta helix</i> dalam pengembangan wisata taman angrek belum berjalan dengan optimal. Pemerintah mendominasi mulai dari perencanaan, pembangunan, penganggaran hingga promosi.	<p>Persamaan Penelitian Terletak pada fokus penelitian yaitu penggunaan konsep <i>penta helix</i>.</p> <p>Perbedaan Penelitian Terletak pada lokus dan objek yang diteliti yaitu pengembangan wisata taman anggrek di Kota Surabaya.</p>

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
(Beatrice dan Hertati, 2023)	Model <i>Penta Helix</i> dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Manggarsari	Didapati bahwa alam pengembangan UMKM Manggarsari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya telah melibatkan ke-lima aktor dalam model <i>penta helix</i> . Meskipun dalam pelaksanaannya, terdapat kendala dalam menjalankan perannya.	<p>Persamaan Penelitian Terletak pada fokus penelitian terkait model <i>penta helix</i>.</p> <p>Perbedaan Penelitian Terletak pada lokus dan objek yang diteliti yaitu terkait pengembangan UMKM Manggarsari.</p>

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang masih relevan dan beririsan dengan implementasi konsep *Penta Helix* dalam Program Literasi Zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung. Dari paparan penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal penggunaan konsep *penta helix*. Namun perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya. Peneliti ingin menganalisis dan mendeskripsikan sejauh mana peran *stakeholders* skema *penta helix* dalam pelaksanaan program literasi zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Bandar Lampung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor yang mendukung dan menghambat peran aktor *penta helix* dalam pelaksanaan program literasi zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui terlibatnya peran antar aktor dapat membantu dalam mencapai tujuan program karena terdapat kesepakatan Bersama dan kesepahaman dalam mencapai tujuan oleh aktor yang terlibat. Namun, masih terdapat kekurangan, seperti belum optimalnya komunikasi antar aktor dalam konsep *penta helix*, kurangnya komunikasi koordinasi di antara para aktor menyebabkan terjadinya kesalahpahaman, dan peran mitra kurang diperhatikan. Oleh karena itu, peneliti

tertarik untuk menggunakan skema *penta helix* sebagai kerangka acuan untuk menerangi peran BAZNAS Kota Bandar Lampung bersama para aktor terkait dalam meningkatkan program literasi zakat di Kota Bandar Lampung.

2.2 Kebijakan Publik

Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan, Kebijakan publik adalah sebuah program yang dirancang dengan tujuan, nilai-nilai, dan praktik tertentu. David Easton mengartikan kebijakan publik sebagai dampak dari aktivitas pemerintah. Sementara menurut Carl I Friedrich, kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks lingkungan tertentu, dengan mempertimbangkan hambatan dan peluang yang ada. Tindakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi dan mengatasi hambatan untuk mencapai tujuan. Dunn, dalam Wibawa (1994), mendefinisikan kebijakan publik sebagai rangkaian pilihan tindakan yang diambil oleh pemerintah (termasuk opsi untuk tidak bertindak) sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. (Maulana & Nugroho, 2019).

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, kebijakan publik secara ringkas merupakan serangkaian tindakan yang diinisiasi oleh pemerintah termasuk pilihan untuk bertindak atau tidak dengan tujuan tertentu dan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Setiap negara menghadapi tantangan serupa, namun perbedaannya terletak pada cara mereka mengatasi masalah tersebut. Pendekatan untuk menyelesaikan masalah ini dikenal sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan jawaban dari permasalahan suatu wilayah yang dikelola oleh negara atau pemerintahan, atau pihak yang memegang kekuasaan di negara tersebut. Oleh karena itu, Kebijakan publik adalah upaya praktis yang dilakukan pemerintah untuk mengelola kehidupan bersama dalam masyarakat dan negara (Mustari, 2015).

2.3 Implementasi Kebijakan

2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah langkah penting dalam proses kebijakan setelah tahap penyusunan kebijakan publik. Implementasi proses menjadi fase krusial dalam proses kebijakan menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Bahkan kebijakan implementasi mempunyai bobot sekitar 60%, sementara kebijakan perumusan dan kebijakan evaluasi hanya sekitar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dirumuskan dengan baik, namun jika tidak dijalankan, maka hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak yang signifikan. (Maulana & Nugroho, 2019).

Sementara menurut Mazmanian dan Sabatier implementasi adalah pelaksanaan keputusan berupa undang-undang, perintah eksekutif, keputusan badan peradilan, atau keputusan lainnya. Keputusan ini mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menetapkan tujuan atau sasaran yang jelas, dan menyediakan berbagai cara untuk mengatur proses pelaksanaannya (Kadji, 2015).

Kemudian, Grindle (1980) menyatakan bahwa implementasi adalah langkah-langkah umum dari tindakan administratif pada suatu program tertentu. Proses implementasi dimulai setelah penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan program kegiatan, serta penyaluran dana untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut van Meter dan Horn dikutip dalam Wibawa, dkk (1994) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok untuk mencapai tujuan (Maulana & Nugroho, 2019). Selanjutnya Charles Jones mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang bertujuan untuk menjalankan suatu program dengan mempertimbangkan tiga kegiatan yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan (Mustari, 2015).

Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan serangkaian langkah yang diambil oleh individu atau kelompok sektor pemerintah

atau swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada keputusan kebijakan sebelumnya. Langkah-langkah ini mencakup upaya untuk menerjemahkan keputusan kebijakan menjadi tindakan teknis operasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan, serta melanjutkan usaha untuk mewujudkan perubahan besar maupun kecil yang telah diamanatkan oleh keputusan kebijakan sebelumnya (Kadji, 2015).

2.3.2 Model-Model Implementasi Kebijakan

Untuk memahami lebih lanjut esensi penerapan kebijakan, berikut adalah beberapa model penerapan kebijakan yang telah diuraikan oleh para ahli dan pengamat kebijakan publik:

1. Model Smith (1973)

Model Smith dalam Tachjan (2006) adalah model yang paling klasik, yaitu model proses atau alur Smith. Menurut Smith, dalam proses implementasi terdapat empat faktor yang harus diperhatikan. Keempat faktor dalam implementasi kebijakan publik tersebut adalah:

- 1) *Idealised policy*: yaitu pola interaksi yang ditetapkan dan berupaya diwujudkan.
- 2) *Target groups*: yaitu pihak yang secara langsung mempengaruhi kebijakan dan bertanggung jawab untuk mengikuti pola interaksi pembuat kebijakan.
- 3) *Implementing organization*: yaitu badan/unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.
- 4) *Environmental factor*: yakni unsur lingkungan/eskternal yang mempengaruhi atau dipengaruhi penerapan kebijakan, termasuk aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

2. Model Van Meter dan Van Horn (1975)

Model Van Meter dan Van Horn dalam Mustari (2015) Mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung secara linier dari kebijakan publik, melalui pelaksana, hingga kinerja

kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik meliputi:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik organisasi pelaksana
- 4) Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- 5) Sikap pelaksanaan
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Semua variabel diatas membentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan yang mereka terapkan dan menentukan seberapa efektif kinerja kebijakan tersebut. Kognisi, netralitas, dan objektivitas individu pelaksana mempengaruhi respon terhadap semua variabel tersebut. Respons individu pelaksana ini menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang efektif tanpa adanya komunikasi antar pelaksana kebijakan dalam organisasi. Dalam organisasi publik, pemimpin atau atasan harus mampu mengkomunikasikan kebijakan dan menciptakan kondisi kerja yang memungkinkan staf atau pelaksana kebijakan memiliki kapasitas dan motivasi kerja yang memadai.

3. Model Charles Jones (1996)

Model C Jones dalam Mustari (2015) Menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjalankan suatu program dan tekanan pada kemampuan organisasi, dengan memperhatikan tiga aktivitas utama yaitu:

- 1) Organisasi: pembentukan dan pengaturan kembali sumber daya dan metode untuk pelaksanaan program.
- 2) Interpretasi: menafsirkan program agar rencana menjadi arah yang tepat, dapat diterima, dan dilaksanakan.
- 3) Aplikasi: terkait dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang mencakup penyediaan barang dan jasa.

4. Model Edward III (1980)

Model Edward III dalam Mustari (2015) menyarankan untuk memperhatikan 4 (empat) isu agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu:

- 1) Komunikasi: berkaitan dengan cara kebijakan yang disampaikan kepada organisasi atau publik. Pada aspek komunikasi, terdapat tiga indikator: (1) transmisi, (2) kejelasan, dan (3) konsistensi.
- 2) Sumber Daya: berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendorong, terutama sumber daya manusia. Hal ini mencakup kemampuan pelaksana untuk menjalankan kebijakan secara efektif.
- 3) Sikap Pelaksana : berkaitan dengan kesediaan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan publik tersebut melalui kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
- 4) Struktur Birokrasi: berkaitan dengan fleksibilitas organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan.

Di Indonesia, sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan akibat kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan/atau pemerintahan. Menurut Edward, ada dua karakteristik yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi menjadi lebih baik, yaitu: penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pelaksanaan fragmentasi atau membagi tanggung jawab kegiatan atau aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja.

5. Model Matland (1995)

Matland mengembangkan Model Matriks Ambiguitas-Konflik. Pertama, implementasi administratif terjadi dalam operasi sehari-hari birokrasi pemerintahan, dengan ambiguitas dan konflik yang rendah. Kedua, implementasi politik memerlukan paksaan karena meskipun ambiguitasnya rendah tingkat konfliknya tinggi. Ketiga, implementasi eksperimental diterapkan pada kebijakan yang ambigu, tetapi dengan tingkat konflik yang rendah. Keempat,

implementasi simbolik dilakukan pada kebijakan yang memiliki ambiguitas dan konflik tinggi (Mustari, 2015). Pada prinsipnya matrik matland memiliki “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan yaitu:

- 1) Ketepatan Kebijakan: mencakup (1) sejauh mana kebijakan dapat menyelesaikan masalah, (2) apakah kebijakan tersebut sesuai dengan karakteristik masalah yang ingin diatasi, dan (3) apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan misi kelembagaan yang sesuai dengan karakteristik kebijakan.
- 2) Ketepatan Implementasi: berhubungan dengan aktor yang mengimplementasikan kebijakan, yang tidak terbatas pada pemerintah. Namun meliputi pemerintah dan masyarakat/swasta, atau pelaksanaan kebijakan oleh sektor swasta.
- 3) Target Ketepatan: mencakup (1) apakah target yang diintervensi sesuai dengan rencana dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain, (2) apakah sasaran dalam kondisi siap untuk diintervensi, dan (3) apakah intervensi kebijakan merupakan tindakan baru atau pembaruan dari kebijakan sebelumnya.
- 4) Ketepatan Lingkungan: mencakup (1) lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan lembaga terkait, dan (2) kebijakan lingkungan eksternal yang bersifat eksogen, terkait dengan persepsi publik, dan interpretasi individu-individu yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan.

2.3.3 Aktor Implementasi Kebijakan Perspektif Governance

Stoker (1998) dalam Kurniawan (2007) *governance* Mengacu pada evolusi gaya kepemimpinan di mana batas antara sektor publik dan swasta menjadi kabur. Hal ini sejalan dengan kebutuhan negara-negara modern untuk mengintegrasikan lebih banyak mekanisme politik dan

mengakui pentingnya isu-isu yang mencakup empati dan perasaan publik untuk terlibat secara lebih aktif, sehingga memberikan peluang untuk mobilisasi baik secara sosial maupun politik (Kurniawan, 2007). Kemudian *Governance* merupakan perubahan dalam pelaksanaan kebijakan publik yang tidak hanya berfokus pada pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktor lain dari masyarakat, sektor swasta, dan sektor lainnya (Astuti dkk., 2020).

Selanjutnya Sedamaryanti (2009) dalam Rahmawati dkk. (2014) mengungkapkan pada dasarnya pemangku kepentingan dalam tata kelola (*governance stakeholders*) terbagi menjadi tiga kategori:

1. Negara/Pemerintah

Secara umum, konsep pemerintahan mencakup aktivitas negara, namun lebih luas dari itu melibatkan sektor swasta dan lembaga masyarakat.

2. Sektor Swasta

Pelaku sektor swasta meliputi perusahaan swasta yang terlibat dalam interaksi pasar, seperti industri, perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk juga kegiatan di sektor informal.

3. Masyarakat Madani

Merupakan kelompok masyarakat yang terletak di antara pemerintah dan individu atau kelompok masyarakat lainnya yang terlibat dalam interaksi sosial, politik, dan ekonomi.

Pemerintah tidaklah menjadi satu-satunya aktor dalam sebuah tata kelola. Interaksi antara pemangku kepentingan tersebut menunjukkan adanya kesempatan yang setara dalam tata kelola, terutama dalam pelaksanaan atau implementasi program-program pemerintah (Astuti dkk., 2020). Hanberger (2004) dalam Astuti dkk (2020) membagi karakteristik model *governance* menjadi 3 yaitu:

1. Terkoordinasi oleh negara (*state coordinated*).

Merupakan model yang melibatkan berbagai aktor, namun pengelolaannya masih mengikuti pemerintahan konvensional.

Negara tetap menjadi pelaku utama dan pemerintah atau aktor di tingkat bawah bertindak sebagai perantara. Proses implementasi bersifat *top-down* dan memerlukan kontrol manajemen yang kuat untuk berfungsi secara efektif.

2. Terkoordinasi oleh pemerintah daerah (*local government coordinated*)

Merupakan model di mana pemerintah daerah telah mengambil atau diberi peran dengan mandat dari pemerintah pusat. Kekuasaan dan tanggung jawab dirumuskan dalam bentuk desentralisasi. Proses implementasi berupa kombinasi proses dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, yang tujuannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal, baik dari tingkat atas maupun bawah.

3. Terkoordinasi oleh multi-aktor (*multi actor coordinated*)

merupakan model di mana pemerintah pusat dan daerah hanya dua dari beberapa aktor yang berupaya mengoordinasikan sumber daya secara bersama-sama. Dasar hukum dari model ini adalah perjanjian atau kontrak antara para aktor yang terlibat. Model ini relevan dalam situasi yang kompleks. Akuntabilitas adalah kelemahan dalam model ini, semua aktor bertanggung jawab atas tindakan bersama atau keputusan untuk tidak bertindak, dan pada saat yang sama, setiap aktor juga bertanggung jawab kepada organisasi yang diwakilinya.

2.4 Konsep Aktor *Penta helix*

Selain aktor-aktor pada teori *governance* yang telah dipaparkan sebelumnya, menurut Arif Yahya dalam implementasi kebijakan terdapat Model *Penta helix* yang menjelaskan peran aktor dalam implementasi kebijakan (Yuningsih dkk., 2019). Model *penta helix* menjadi referensi menciptakan sinergi antara berbagai instansi terkait dalam mendukung tercapainya tujuan secara optimal. (Soemaryani, 2016). Sementara menurut Rampersad, Quester, & Rohani dalam Halibas dkk (2017) menyatakan bahwa kerja sama *penta helix* memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian tujuan inovasi bersama, dan kontribusi *penta helix* dapat memajukan perkembangan sosial dan ekonomi daerah.

Penta helix merupakan perkembangan dari konsep strategi *triple helix* yang diperkenalkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff. Model *Triple Helix* melibatkan tiga unsur utama: sejarawan, sektor bisnis, dan pemerintah. Dalam model ini, industri bertanggung jawab untuk menciptakan inovasi, universitas bertanggung jawab untuk menciptakan pengetahuan, dan keduanya berinteraksi dengan pemerintah. Ketiganya bekerja sama melalui pendekatan *top-down* untuk mendorong terciptanya inovasi (Tonkovic dkk., 2015).

Triple Helix telah dicampur dengan penambahan satu elemen, yaitu *Civil Society* atau masyarakat sipil, yang kemudian membentuk *Quadruple Helix*. Di Indonesia, model *Quadruple Helix* ini kemudian diperkaya dengan penambahan satu elemen lagi, yaitu media, sehingga melengkapi elemen-elemen dalam konsep *Penta Helix*. Dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, media baik konvensional dan digital memainkan peran penting meskipun sebagai entitas yang independen atau tidak langsung dipengaruhi oleh unsur-unsur lainnya dalam menjalankan fungsinya. Pada tahun 2016, melalui ide Menteri Pariwisata Arief Yahya, kerja sama lintas sektor GBCAM (pemerintahan, bisnis, komunitas, akademi, dan media) kemudian diadopsi sebagai model pengembangan pariwisata (Nurulwahida dkk., 2020). Model *Penta Helix* diimplementasikan dalam Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. (Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, 2016).

Adapun kajian literatur sebagai pelengkap hasil penelitian kualitatif terkait dengan model *penta helix*, pada dasarnya adalah perjanjian formal atau informal antara dua atau lebih organisasi untuk meningkatkan kemampuan mereka melalui hubungan atau kombinasi sumber daya. (Supriyanto dan Iskandar, 2022). Berikut peran tiap unsur *penta helix* dalam Slamet dkk (2016):

1. Pemerintah

Pemerintah berperan sebagai *regulator*. Pemerintah memiliki peran sebagai regulator sekaligus kontroler yang bertanggung jawab atas pengembangan objek. Mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, promosi, pengembangan pengetahuan, dan kemitraan publik-swasta. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran dalam mengkoordinasi kepentingannya keberbagai pemangku kepentingan.

2. Bisnis

Bisnis berperan sebagai *enabler*. Bisnis merupakan entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk menciptakan nilai tambah dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebagai penggerak, bisnis menyediakan infrastruktur atau inovasi dan mendukung dengan menyediakan sumber daya keuangan, untuk pengembangan sektor terkait.

3. Akademisi

Akademisi berperan sebagai *konseptor*. Akademisi berperan sebagai penyedia pengetahuan, menggunakan konsep dan teori-teori terkini yang relevan dengan aktivitas atau sektor yang sedang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dan berkelanjutan.

4. Masyarakat

Masyarakat berperan sebagai *akselerator*. Masyarakat merujuk kepada individu-individu yang memiliki minat serupa dan relevan dengan perkembangan aktivitas tertentu. Mereka dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemangku kepentingan untuk memfasilitasi proses pengembangan sektor tersebut. Masyarakat memiliki peran penting dalam memajukan kerjasama di dalamnya.

5. Media

Media berperan sebagai *expenders* atau pemekar. Media memiliki peran penting dalam mendukung publikasi dan promosi serta membangun citra. Dalam program pengembangan kerjasama pariwisata, media memiliki dampak yang signifikan karena kehadiran teknologi dan media modern yang mendominasi.

2.5 Konsep Pengelolaan dan Literasi Zakat

Secara hukum Islam, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai satu tahun dan memenuhi nishab, yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Puskas BAZNAS, 2019). Zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 didefinisikan sebagai kewajiban memberikan sebagian harta yang dimiliki oleh umat Islam, baik secara individu maupun melalui entitas seperti perusahaan, badan usaha, atau lembaga, kepada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerimanya. Undang-Undang ini juga menegaskan peran BAZNAS sebagai lembaga non-struktural yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat di tingkat nasional.

Adapun dalam Puskas BAZNAS (2019) pengelolaan zakat melalui lembaga amil resmi memiliki tiga manfaat sebagai berikut:

1. Lebih Syar'i

Kelebihan ketika zakat disalurkan melalui lembaga amil zakat adalah bahwa pendistribusiannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Kahf (2002) seperti yang dikutip dalam Puskas Baznas (2019) pengelolaan zakat oleh lembaga amil mampu secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakat dalam waktu kurang dari dua tahun.

2. Lebih Maslahat

Dari perspektif ekonomi makro dan kepentingan publik yang lebih luas, jika zakat diberikan langsung kepada mustahik, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan menjadi tidak signifikan. Padahal, salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini karena zakat yang dikelola oleh lembaga resmi memiliki potensi yang lebih besar untuk diberdayakan kepada masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Irfan S. Beik (2010) dalam Puskas BAZNAS (2019), program zakat yang dikelola melalui lembaga amil berhasil mengurangi tingkat kemiskinan mustahik di DKI Jakarta sebesar 16,97 persen.

3. Lebih Ikhlas dan Berkah

Menunaikan zakat melalui lembaga lebih terjamin keikhlasannya. Hal ini karena pendistribusian zakat melalui lembaga membantu muzaki agar terhindar dari motif politik atau kepentingan serupa yang dapat mengurangi nilai pahala zakat. Selain keikhlasan, aspek keberkahan juga sangat penting. Melalui pembayaran zakat melalui lembaga amil resmi, muzaki dapat memperoleh doa yang dipanjatkan oleh amil, yang diyakini membawa berkah.

Sementara itu, saat ini konsep literasi zakat belum memiliki definisi yang absolut baik dalam buku teks maupun dalam penelitian. Namun jika dipadankan dengan definisi literasi secara umum, maka literasi zakat dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, menghitung, dan mengakses informasi mengenai zakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran mereka dalam membayar zakat (Puskas BAZNAS, 2019).

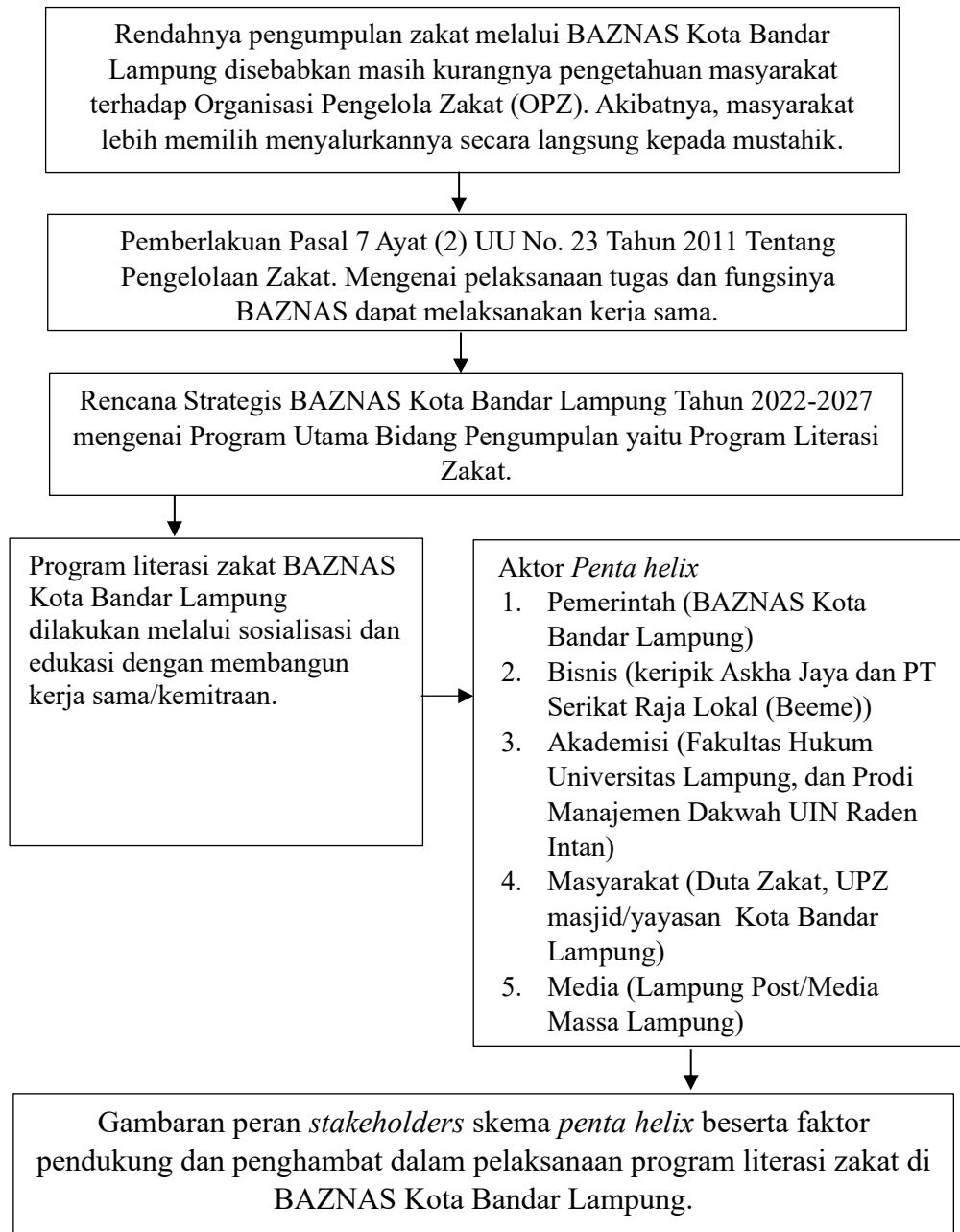
Literasi zakat yang dilakukan BAZNAS adalah salah satu metode untuk memberikan pengetahuan tentang segala hal terkait zakat, menyebarkan informasi mengenai BAZNAS, dan cara pengelolaannya. Secara tidak langsung, hal ini akan membuat umat muslim yang sudah berkewajiban menjadi lebih patuh dalam menunaikan zakat (Masfufah, 2021). Menurut Istikhomah & Asrori (2019) dalam BAZNAS (2020) menjelaskan bahwa literasi zakat berpengaruh positif terhadap minat muzaki dalam berdonasi ke lembaga amil zakat. Oleh karena itu, upaya meningkatkan literasi zakat dapat dilakukan oleh lembaga zakat melalui sosialisasi, edukasi, dan kampanye untuk membangun kepercayaan mengenai zakat.

2.6 Kerangka Berpikir

Kota Bandar Lampung memiliki potensi zakat yang besar, berdasarkan Indikator Pemetaan Zakat (IPPZ) tahun 2022 yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS RI. Kota Bandar Lampung memiliki total potensi zakat sebesar Rp 663,19 miliar. Rendahnya penghimpunan zakat di Kota Bandar Lampung

disebabkan masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Pengumpul Zakat, akibatnya masyarakat lebih percaya menyalurkannya secara langsung kepada penerima (mustahik). Dengan potensi zakat tersebut realisasi zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung di tahun 2020 sebesar Rp 2.645.700.365, di tahun 2021 terealisasi Rp 3.451.237.933, dan di tahun 2022 hanya terealisasi Rp 2.795.512.497. Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat dengan mengeluarkan program literasi zakat yang tertuang dalam Rencana Strategis BAZNAS Kota Bandar Lampung 2022-2027. Adapun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 7 ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan kerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut pelaksanaan program literasi zakat dilakukan melalui sosialisasi edukasi dengan melakukan kerjasama atau kemitraan agar berjalan berkelanjutan.

Oleh karena itu untuk memaksimalkan potensi yang ada perlu dilakukan dengan meningkatkan program literasi zakat sebagai dasar meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat melalui BAZNAS. Dalam penelitian ini mengadaptasi konsep *penta helix* menurut Slamet dkk (2017) yang terdiri dari pemerintah, bisnis, akademisi, masyarakat, dan media. Model ini akan menjelaskan bagaimana peran masing-masing *stakeholders* dalam mendukung pelaksanaan program literasi zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah peneliti, 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengamati kondisi alamiah dari objek penelitian, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan sampai penulisan hasil penelitian. Temuan dari penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap makna daripada melakukan generalisasi (Sugiyono, 2013).

Pendekatan deskriptif dipilih untuk menjelaskan atau memberikan gambaran fenomena yang akan diteliti. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis tentang fenomena berdasarkan fakta, karakteristik, dan hubungan antar fenomena (Hardani dkk., 2022). Pemilihan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran peran *stakeholders* skema *penta helix* dalam pelaksanaan program literasi zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung beserta faktor pendukung dan penghambatnya dalam konteks alamiah. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang mendukung penelitian serta mengukur pelaksanaan program tersebut dengan lebih efektif.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan masalah yang akan diteliti, yang bertujuan untuk mengarahkan penelitian dan memilih data yang relevan. Dalam konteks penelitian kualitatif, fokus penelitian adalah batasan masalah yang bersifat khusus dan terbatas, membantu peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian tanpa mengabaikan aspek-aspek penting (Hardani dkk., 2022). Mengingat pentingnya fokus penelitian maka penelitian ini akan berfokus pada:

1. Peran *stakeholders* skema *penta helix*, artinya penelitian ini berfokus pada peran *stakeholders* skema *penta helix* dalam pelaksanaan program literasi zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Fokus analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengenai upaya atau peran, bentuk dan dorongan kerja sama yang dilakukan, serta bagaimana komunikasi 5 (lima) *stakeholders penta helix* (Pemerintah, Bisnis, Akademisi, Masyarakat, dan Media) dengan menggunakan indikator *penta helix* menurut Slamet dkk (2016) yaitu:

- a. Pemerintah

Indikator pemerintah berkaitan dengan peran BAZNAS Kota Bandar Lampung selaku aktor utama dari pemerintah dalam perannya sebagai regulator yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam mengembangkan program, serta bekerja sama atau mengkoordinasikan urusannya kepada masing-masing kelompok kepentingan dalam pelaksanaan program literasi zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

- b. Bisnis

Indikator bisnis berkaitan dengan peran aktor bisnis Beeme dan Keripik Askha Jaya sebagai *enabler* atau *supporter* yang membantu dalam hal permodalan dan infrastruktur terkait perubahan pada produk yang dihasilkan ke era digital pada pelaksanaan program literasi zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

c. Akademisi

Indikator akademisi berkaitan dengan peran aktor akademisi Fakultas Hukum UNILA, FISIP UNILA, dan Manajemen Dakwah UIN RIL sebagai konseptor dalam hal sumber pengetahuan yang relevan dengan kegiatan atau sektor yang dikembangkan terkait pelaksanaan program literasi zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

d. Masyarakat

Indikator masyarakat berkaitan dengan peran aktor masyarakat UPZ yayasan, UPZ masjid, dan Duta Zakat sebagai akselerator. Dalam hal ini masyarakat merupakan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan pelaksanaan program literasi zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

e. Media

Indikator media berkaitan dengan peran aktor media Lampung Post, Tribun Lampung, dan Media BAZNAS Kota Bandar Lampung sebagai expander atau pemekar. Media berperan mendukung publikasi dalam promosi pelaksanaan program literasi zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholders* skema *penta helix* dalam pelaksanaan program literasi zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Faktor pendukung merupakan hal-hal yang menjadi dorongan melakukan kerjasama *penta helix* agar mampu mencapai tujuan program. Sementara faktor penghambat berkaitan dengan kendala yang dihadapi masing-masing *stakeholders* dalam konsep *penta helix* program literasi zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Bandar Lampung. BAZNAS Kota Bandar Lampung merupakan lembaga non struktural yang dibentuk pemerintah dengan merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil riset selama 6 bulan

pada saat pelaksanaan magang bersertifikat MBKM di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Diketahui bahwa BAZNAS Kota Bandar Lampung memiliki potensi zakat yang besar senilai Rp 663,19 miliar untuk dapat dihimpun dan diperdagunakan. Serta memiliki semangat bersinergi dan bekerjasama dalam memaksimalkan literasi zakat untuk meningkatkan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BAZNAS Kota Bandar Lampung 2022-2027.

3.4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah subjek data yang diperoleh oleh peneliti untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. Peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder dalam Hardani dkk (2022) sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau asli. Jenis data ini bisa berupa pendapat individu atau kelompok yang terkait dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi untuk mengeksplorasi peran *stakeholders* skema *penta helix* dalam pelaksanaan program literasi zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung, serta faktor pendukung dan penghambatnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan, membaca, dan memahami teori-teori yang terdapat dalam buku, artikel, jurnal, atau data yang tersedia di internet yang relevan dengan peran *stakeholders* skema *penta helix* dalam pelaksanaan program literasi zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung, serta faktor pendukung dan penghambatnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk kata-kata dan pernyataan sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian. Adapun berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek seperti individu, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, dan kekhawatiran. Dalam penelitian kualitatif, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian yang melibatkan pertanyaan dan jawaban secara langsung, dengan atau tanpa panduan wawancara (Murdiyanto, 2020). Dalam penelitian ini, penulis menerapkan wawancara mendalam dengan memilih informan secara sengaja. Oleh karena itu, penelitian ini meliputi penyusunan pedoman wawancara yang sistematis dan komprehensif untuk pengumpulan data. Wawancara dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada 5 (lima) kategori informan yang mewakili unsur *penta helix* diantaranya yaitu:

Tabel 4. Informan Penelitian

Unsur	Informan	Institusi
Pemerintah	1. Dr. Abdul Aziz, M.Pd.I.	1. Ketua Bidang I, Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Bandar Lampung,
	2. Doni Peryanto, S.PI	2. Kepala sekretariat dan staff pelaksana bidang pengumpulan BAZNAS Kota Bandar Lampung
Bisnis	1. Asan	1. Manajer Keripik Askha Jaya
	2. Yongki Alfarizi	2. Manajer PT Serikat Raja Lokal (Beeme)

Unsur	Informan	Institusi
Akademisi	1. Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.	1. Tim MKBM Fakultas Hukum Universitas Lampung
	2. Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	2. Kaprodi Manajemen Dakwah UIN Raden Intan Lampung
Masyarakat	1. Arif	1. Ketua UPZ Masjid Khoirul Falah Teluk Betung Selatan
	2. Iwan Susanto	2. Sekretaris UPZ Masjid Al-Huda Sukarame
	3. Santoni	3. Sekretaris UPZ Masjid Baitullah Sukabumi
	4. Suprpto	4. Penasehat UPZ Masjid Nurul Amal Langkapura
	5. Nani Samaniah	5. Ketua UPZ YAPEPAM Kota Bandar Lampung
	6. Asep Soemantri	6. Ketua UPZ Yayasan Ruwai Jurai
	7. Nurhidayat	7. Ketua UPZ Yayasan Asmai Rahman
	8. Solehah	8. Ketua UPZ Yayasan Mustika Lampung
	9. Nur Rachmad	9. Duta Zakat BAZNAS Bandar Lampung
	10. Eliza Agustina	10. Duta Zakat BAZNAS Bandar Lampung
	11. Ajeng Oktasari	11. Duta Zakat BAZNAS Bandar Lampung
	12. Anisa Ayu	12. Duta Zakat BAZNAS Bandar Lampung
Media	1. Wiji Sukamto	1. <i>Marketing Communication</i> Lampung Post

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

2. Observasi

Observasi merupakan tindakan menyaksikan kegiatan manusia, karakteristik fisik dari suatu situasi sosial, dan bagaimana perasaan yang timbul selama berada dalam situasi tersebut (Murdiyanto, 2020). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat langsung objek penelitian di BAZNAS Bandar Lampung yang bertujuan untuk memperoleh analisis mendalam mengenai pelaksanaan program literasi zakat. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu selama pra riset dan

riset penelitian dengan mengikuti beberapa agenda BAZNAS Kota Bandar Lampung terkait pengumpulan zakat, infak, dan sedekah.

3. Dokumentasi

Dokumen digunakan sebagai sumber data untuk mendukung penelitian, dapat berupa teks tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang memberikan informasi bagi penelitian (Murdiyanto, 2020). Teknik dokumentasi ini melibatkan pengumpulan data tertulis dari materi, teori, informasi yang dianggap relevan untuk mendukung pengembangan penelitian. Dokumentasi penelitian ini melibatkan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber diantaranya:

Tabel 5. Dokumen Pendukung Penelitian

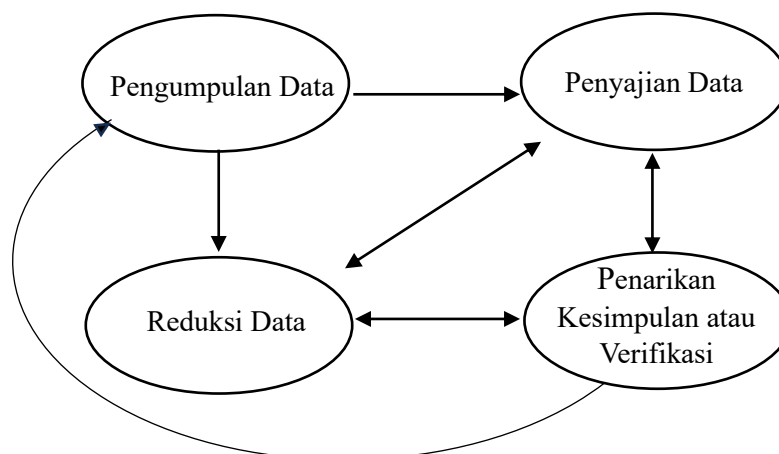
No	Jenis Dokumentasi	Substansi Dokumen
1	UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	Tentang kewenangan pengelolaan zakat oleh BAZNAS
2	PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	Tentang pelaksanaan pedoman pengelolaan zakat
3	Renstra BAZNAS RI 2020-2025	Data program meningkatkan literasi zakat BAZNAS
4	Renstra BAZNAS Bandar Lampung 2022-2027	Data program meningkatkan literasi zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung
5	Surat Edaran Sinergi Zakat Walikota Bandar Lampung Nomor: 451.13/712.A/I.08/2017 Tentang Gerakan Sadar Zakat	Data pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah dikalangan OPD
6	Surat Kerjasama BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan Keripik Askha Jaya	Pelaksanaan kerja sama BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan Keripik Askha Jaya
7	Surat Kerjasama UPZ Masjid dan Yayasan BAZNAS Kota Bandar Lampung	Pelaksanaan kerja sama UPZ BAZNAS Kota Bandar Lampung bersama masjid dan yayasan
8	Foto Sertifikat Taat Zakat Beeme	Data pelaksanaan zakat Beeme ke BAZNAS Kota Bandar Lampung
9	Publikasi Media Sosial BAZNAS dan Mitra	Data pelaksanaan publikasi media sosial BAZNAS Kota

No	Jenis Dokumentasi	Substansi Dokumen
		Bandar Lampung dengan media massa Lampung

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Bogdan dalam Hardani dkk (2022) Analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan proses sistematis penyusunan dan penemuan makna dari data yang diperoleh, seperti wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya. Hal ini bertujuan untuk memahami data dengan baik dan menjelaskannya secara jelas kepada orang lain. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisa interaktif yang dicetuskan Miles dan Huberman (1992) diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 2. Komponen dalam analisis data (model interaktif)

Sumber: Miles dan Huberman (1992) dalam Hardani dkk. (2022)

1. Reduksi Data

Data dalam penelitian kualitatif sering kali berbentuk narasi deskriptif yang mengisahkan kejadian atau fenomena. Reduksi data dalam konteks ini berarti menyusutkan volume data dengan cara merangkumnya, menyoroti hal-hal pokok, memusatkan perhatian pada inti persoalan, dan

mencari pola atau tema yang muncul. Menurut Riyanto (2003), reduksi data adalah proses menyederhanakan, memilih informasi yang relevan, dan mengabstraksikan inti dari data yang ada. Dalam melakukan reduksi data, peneliti dipandu oleh tujuan penelitian yang ingin dicapai. Bagi peneliti yang masih baru, berdiskusi dengan pakar dan rekan sejawat dapat membantu mengembangkan pemahaman dan wawasan mereka dalam melakukan reduksi data.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data selesai, langkah selanjutnya ialah mempresentasikan data. Dalam penelitian kualitatif data dapat disajikan dalam berbagai format seperti ringkasan naratif, diagram, hubungan antar kategori, atau diagram alur. Namun, format yang paling umum digunakan adalah teks naratif. Dalam penelitian ini, data disajikan melalui deskripsi atau paparan hasil wawancara dengan informan yang memiliki pemahaman mendalam tentang implementasi program ini, serta menggunakan dokumen sebagai data tambahan.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan penelitian kualitatif mungkin bisa memberikan jawaban terhadap rumusan masalah awal, tetapi kadang juga tidak, karena rumusan masalah dalam penelitian ini bisa berubah seiring dengan perkembangan di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif sering kali menghasilkan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi atau gambaran yang lebih jelas tentang objek yang diteliti, bisa juga mengungkap hubungan kausal atau interaktif, atau menyajikan hipotesis atau teori baru.

3.7 Uji Kredibilitas

Beberapa metode yang digunakan untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian ini meliputi beberapa pendekatan sebagaimana menurut Murdiyanto (2020) yaitu:

1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti kembali melakukan observasi dan wawancara dengan sumber data yang telah ditemui sebelumnya atau mungkin yang baru ditemui. Dengan melakukan hal ini, hubungan antara peneliti dan narasumber akan semakin terjalin, sehingga timbul saling kepercayaan dan tidak ada lagi informasi yang disembunyikan. Fokusnya adalah pada pengujian terhadap kebenaran dan konsistensi data yang diperoleh, apakah data tersebut setelah diperiksa kembali tetap sesuai atau mengalami perubahan.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Dalam melakukan triangulasi, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber penelitian, seperti dokumen dan hasil wawancara. Tujuan dari triangulasi sumber ini adalah untuk memverifikasi data yang diperoleh dengan memeriksa kembali melalui sumber-sumber data yang tersedia.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi merupakan dukungan yang digunakan untuk memvalidasi data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contohnya, hasil wawancara memerlukan dukungan dari rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia atau gambaran keadaan juga memerlukan dukungan dari foto-foto. Dalam laporan penelitian, disarankan untuk melengkapi data-data yang disajikan dengan foto-foto atau dokumen autentik agar lebih dapat dipercaya.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Jika dilihat dari indikator konsep *penta helix* menurut Slamet dkk (2016).

Kelima *stakeholders* memiliki peran masing-masing tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu optimalisasi pengumpulan dan peningkatan kesadaran berzakat di Kota Bandar Lampung.

- A. Pada unsur pemerintah, BAZNAS Kota Bandar Lampung berperan sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator yang turut bekerja sama kebeberbagai aktor kepentingan. Dalam hal ini peran pemerintah masih dominan pada seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program literasi zakat.
- B. Pada unsur bisnis, Keripik Askha Jaya dan Beeme berperan sebagai *enabler*/penggerak sekaligus supporter membantu pengembangan kegiatan edukasi yang dilakukan melalui promosi dan sosialisasi penyaluran.
- C. Pada unsur akademisi, FH UNILA, FISIP UNILA, dan MD UIN RIL berperan sebagai konseptor melalui kegiatan Tridharma perguruan tinggi sekaligus mitra Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dengan peran yang dapat dioptimalkan melalui keterlibatan dosen/pengajar dalam skema penelitian dan pengabdian.
- D. Pada unsur masyarakat, UPZ yayasan/masjid dan duta zakat berperan sebagai akselerator, namun dalam pelaksanaannya belum

optimal akibat tidak adanya pembinaan dan *mentoring* yang berkelanjutan.

- E. Pada unsur media, Lampung Post dan Tribun Lampung berperan sebagai pemekar melalui kegiatan peliputan dan publikasi, namun belum optimal dalam memanfaatkan kemediain yang dimiliki BAZNAS Kota Bandar Lampung.

5.1.2 Adapun faktor pendukung peran *stakeholders* skema *penta helix* dalam pelaksanaan program literasi zakat adalah karena adanya dasar hukum yang jelas dan kesadaran bersama dalam meningkatkan program literasi zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Sedangkan, faktor penghambatnya adalah komunikasi yang belum berkelanjutan berupa *mentoring*/pembinaan, dan keterbatasan tenaga kerja mumpuni dalam pengelolaan kemediain di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam analisis peran *stakeholders* skema *penta helix* dalam pelaksanaan program literasi zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung, sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Bandar Lampung sebaiknya dapat memberikan forum pertemuan tatap muka secara berkala kepada aktor mitra sebagai bentuk pembinaan atau *mentoring* penguatan kapasitas pemahaman dan motivasi kerja dalam pelaksanaan program literasi zakat.
2. BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat memberikan pelatihan kemediain atau menambah tenaga kerja spesialis untuk memperkuat pengelolaan kemediain yang dimiliki, dan/atau dapat juga melakukan kerja sama dengan *influencer selebgram* muslim untuk membantu mengedukasi dan promosi.
3. BAZNAS Kota Bandar Lampung sebaiknya dapat menambahkan poin edukasi dan literasi pada Surat Keputusan (SK) UPZ untuk mempertegas regulasinya dalam keterlibatan pelaksanaan program literasi zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Parisi. (2017). Tingkat Efisiensi dan Produktivitas Lembaga Zakat di Indonesia. *Esensi*, 7(1), 63–72. <https://doi.org/10.15408/ess.v7i1.3687>
- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya. In *Bank Sentral Indonesia* (Vol. 9). <https://publication-bi.org/repec/idn/wpaper/WP92018.pdf>
- Astuti dkk. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik* (Tim Dap Press (ed.); Pertama). Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press. [https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/1143/1/collaborative_gov_\(revisi\)_5_7_20-converted-.pdf](https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/1143/1/collaborative_gov_(revisi)_5_7_20-converted-.pdf)
- BAZNAS. (2020). *Efektivitas Kampanye Zakat Terhadap Brand Lembaga dan Pengumpulan Zakat 2020*. Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS). <https://puskasbaznas.com/publications/books/1235-efektivitas-kampanye-zakat-terhadap-brand-lembaga-dan-pengumpulan-zakat>
- BAZNAS Kota Bandar Lampung. (2022). *Rencana Strategis BAZNAS Kota Bandar Lampung 2022-2027*.
- BAZNAS RI. (2020). *Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional 2020-2023*.
- Beatrice dan Hertati. (2023). Model Pentahelix dalam Pengembangan UMKM Manggarsari. *JIMPKS: Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 7(2), 107–123.
- Disdukcapil. (2023). *Statistik Penduduk Kota Bandar Lampung Berdasarkan Agama Per Desember 2023*. Disdukcapil.Bandarlampungkota.Go.Id. Di akses dari <https://disdukcapil.bandarlampungkota.go.id/statistik/agama>
- Halibas dkk. (2017). The penta helix model of innovation in Oman: An hei perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, 12, 159–172. <https://doi.org/10.28945/3735>

- Hardani dkk. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In H. Abadi (Ed.), *LP2M UST Jogja* (Issue March). CV Pustaka Ilmu Group.
- Hernawati. (2021). Upaya Pembinaan Aparatur Sipil Negara Oleh Lembaga Adminitrasi Negara Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Publik*.
- Hudaifah dkk. (2020). Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia. In A. Malik (Ed.), *Kanal* (Pertama, Vol. 3). Scopindo Media Pustaka.
- Humas BAZNAS. (2023). *BAZNAS Bekerja Sama dengan UNAS untuk Memaksimalkan Potensi Zakat*. Baznas.Go.Id. Di akses dari https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Bekerja_Sama_dengan_UNAS_untuk_Memaksimalkan_Potensi_Zakat/1369
- Huzaemah, M. (2022). *Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat Di Kabupaten Soppeng* [Institut Agama Islam Negeri (IAIN)]. <https://repository.ainpare.ac.id/id/eprint/4520>
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas* (Pertama). UNG Press.
- Kemenag. (2022). *Satu Data Kemenag*. Satudata.Kemenag.Go.Id. Di akses dari <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>
- Kurniawan dan Maani. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 67–78. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>
- Kurniawan, T. (2007). Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(23), 1–23. <https://www.academia.edu/download/30961510/ParadigmaAdmPublikTKRevisiasrequested.pdf>
- Maulana & Nugroho. (2019). *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik* (Pertama). CV. AA. RIZKY.
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Pub. L. No. 14, 4 Jurnal Ilmu Lingkungan 20 (2016).
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx

- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). In *Leutikaprio* (Pertama, Vol. 1). PT Leutika Nouvalitera.
- Novelistia, H. A. (2023). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Nurulwahida dkk. (2020). Collaboration with Pentahelix Model in Developing Kajoetangan Heritage Tourism in Malang City. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.22219/logos.v3i1.10699>
- Pertiwi, I. S. M. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat, Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 1–9. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/index>
- Puskas BAZNAS. (2019). *Indeks Literasi Zakat Teori dan Konsep*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional.
- Puspawati dkk. (2023). Analysis of The Implementation of Domestic Violence Prevention in Indonesia. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 25(3), 379–392. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v25i3.42362>
- Rahmawati dkk. (2014). Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 641–647. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/435>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pub. L. No. 23 (2011).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pub. L. No. 14 (2014).
- Rohmania dan Sri Astuti. (2022). Analisis Peran Aktor Penta Helix Dalam Pengembangan Wisata Taman Anggrek Sememi Ex Lokalisasi Moroseneng Kota Surabaya. *Journal Of Gender Equality And Social Inclusion (Gesi)*, 1(1), 69.
- Saputra dan Ulum. (2022). Peran Multi Aktor Dalam Pemberdayaan Petani Kopi Berbasis Pentahelix. *Jurnal GOVERNANSI*, 8, 115–130. <https://doi.org/10.30997/jgs.v8i2.5230>
- Silalahi, W. (2020). Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 56–66. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66>

- Slamet dkk. (2016). Strategi Pengembangan Ukm Digital Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 16(2), 136. <https://doi.org/10.25124/jmi.v16i2.319>
- Soemaryani, I. (2016). Pentahelix model to increase tourist visit to bandung and its surrounding areas through human resource development. *Academy of Strategic Management Journal*, 15(Specialissue3), 249–259. <https://www.proquest.com/openview/091494ef547e622a456cf0dd2210d17a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=38745>
- Sugiarti dkk. (2021). Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(1), 84–92. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1337>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (19th ed.). Alfabeta.
- Supriyanto dan Iskandar. (2022). *Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Meningkatkan Pemberdayaan Umkm Ex Lokalisasi Dolly Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Ds.Point)*. 71–91.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. In *(AIPI) Bandung (Pertama)*. ASosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung.
- Tonkovic dkk. (2015). Applications of Penta Helix Model in Economic Development. *Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics, Croatia*, 4, 385–393. <http://croatianfraternalunion.org/>
- Winarno dkk. (2021). Pengembangan Desa Wisata Adat Using Kemiren melalui Pendekatan Penta Helix. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(2), 137–145. <https://doi.org/10.47650/jglp.v3i2.298>
- Yulianto, F. (2021). Pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Sunan Ampel Surabaya : Telaah Strategi dan Implementasinya. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3, 1–12. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.3.1.1-12>
- Yuningsih dkk. (2019). Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 84. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p84-93>
- Zaenal dkk. (2022). Potensi Zakat BAZNAS RI. In *BAZNAS Badan Amil Zakat Pusat Kajian Strategi*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional. <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1703-potensi-zakat-baznas-ri>
- Zaenal dkk. (2023a). *Indeks Zakat Nasional*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1824-indeks-zakat-nasional>

Zaenal dkk. (2023b). Pengelolaan Zakat Menurut Syariah dan Perundang-Undangan. In *Puskas BAZNAS*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1787-pengelolaan-zakat-menurut-syariah-dan-perundang-undangan>